

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI DESA SEBUBUS KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS

Oleh:
MULYANI
NIM. E01110075

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015.

E-mail: mulyanimursyd@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapat jatah Raskin dilapangan melebihi data yang telah ditetapkan akibatnya jatah penerima raskin menjadi berkurang dikarenakan harus berbagi dengan masyarakat yang belum terdata. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan implementasi program pendistribusian beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) dinilai belum berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan kebijakan ini diharapkan sesuai dengan surat Setda Kabupaten Sambas Nomor: 511.1/038/Ekon tanggal 30 januari 2014 yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Sambas perihal Kebijakan Distribusi Raskin. Penelitian dengan menggunakan teori Edward III (dalam Agustino, 2008:149), tentang variabel yang menentukan keberhasilan implementasi yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pendistribusian beras untuk rumah tangga miskin Di Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas belum berjalan efektif. Belum berjalannya implementasi kebijakan tersebut dikarenakan pendataan yang kurang akurat sehingga masyarakat miskin masih ada yang belum terdata, kemudian kurangnya sosialisasi yang konsisten sehingga pengetahuan masyarakat masih relatif dangkal mengenai program tersebut. Selain itu sumberdaya mengenai fasilitas pendukung implementasi program tersebut juga kurang memadai yang secara tidak langsung berdampak pada implmentor yang kurang responsif terhadap pengaduan masyarakat. Karena masyarakat juga bingung harus protes kemana karena struktur birokrasi yang kompleks dan rumit sehingga mereka lebih memilih protes ke Desa yang menurut mereka lebih dekat. Sebagai solusinya dikemukakan saran: Sosialisasi program pendistribusian Raskin harus diadakan secara konsisten supaya masyarakat lebih mudah memahami dan mengetahui hak mereka untuk memperoleh Raskin. Kerja sama yang baik antar implmentor terutama dalam berkomunikasi sehingga jika terjadi keterlambatan penyaluran Raskin bisa dimaklumi karena ada alasan yang jelas. Sehingga tujuan dari implementasi pendistribusian Raskin dapat efektif dan sesuai harapan implmentor dan masyarakat juga pemerintah.

Kata-kata kunci: Implementasi Program, Pendistribusian Raskin.

ABSTRACT

The problem in this research is that people who receive rations Raskin field exceeds the predefined data quota receiver Raskin consequently be reduced due to the need to share with the community that has not been recorded. Therefore, in the implementation of the implementation of rice distribution program for the poor (Raskin) considered not run in accordance with the prescribed rules. Implementation of such a policy in accordance with the letter of Sambas District Secretariat Number: 511.1 / 038 / Econ dated 30 January 2014 addressed to the Head of Se-Sambas district policy regarding the distribution of Raskin. Research by using the theory of Edward III (in Agustino, 2008: 149), about the variables that determine the success of the implementation, namely: communication, resources, disposition and bureaucracy structure. The method used is qualitative research methods. The results showed that the implementation of rice distribution program for poor households in the village of the District Sebus Paloh Sambas district has not been effective. Implementation of the policy has not progressed due to the lack of accurate data collection so that the poor still exist that have not been recorded, then the lack of a consistent socialization so that the community is still relatively superficial knowledge about these programs. Besides the resources on program implementation support facilities are also inadequate which is not lagsung impact on implmentor less responsive to public complaints. Because people are confused should protest where because of complex bureaucratic structures and complex that they prefer protest to the village which according to them closer. As a solution put forward suggestions: Socialization program Raskin distribution should be held consistently that the community is easier to understand and know their rights to acquire Raskin. Good cooperation between implementor especially in communication so that in case of delays in the distribution of Raskin can be because there are obvious reasons. So the purpose of implementing the distribution of Raskin can be effective and appropriate expectation as well as governments and the implementor.

Keywords: Program Implementation, Distribution Raskin

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh Negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Kemiskinan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu maka kemiskinan harus diatasi. Salah satu cara pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan mengeluarkan kebijakan bantuan kebutuhan pokok masyarakat yaitu pangan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Kebijakan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin). Adapun tujuan dari kebijakan Raskin tersebut adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Namun, dalam Implementasinya Kebijakan tersebut masih memiliki kendala yang menyebabkan hasil dari Implementasi program tersebut belum berjalan sesuai dengan harapan, khususnya implementasi Program Pendistribusian Raskin di Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Menjadi permasalahan penelitian adalah mengapa Implmentasi Program Pendistribusian Beras Miskin Di Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten

Sambas belum berjalan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan?.

Maka fokus penelitian ditekankan padamenggambarkan hasil implementasi program pendistribusian beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) Di Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan hasil implementasi program pendistribusian beras untuk rumah tangga miskin Di Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dikaji dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Sumbangan tersebut khususnya dalam disiplin ilmu sosial yaitu Administrasi Negara dan ilmu lainnya yang berkaitan dengan kajian kebijakan publik khususnya tentang implementasi kebijakan terutama tentang implementasi kebijakan pendistribusian raskin. Manfaat praktis berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan ataupun bahan pertimbangan alternatif kepada Pemerintah ketika memformulasikan suatu kebijakan, serta dalam hal ini pemerintah diharapkan bisa

memperbaiki kebijakan yang sudah ada agar kedepannya kebijakan pendistribusian Raskin benar-benar mencapai sasaran yang tepat.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahapan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sangat penting karena sangat menentukan tujuan yang hendak dicapai. Karena suatu kebijakan yang telah dibuat tidak akan berfungsi jika tidak di Implementasikan.

Implementasi merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/dijetujui (Tadjhan, 2008:25). Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012:149) membatasi implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

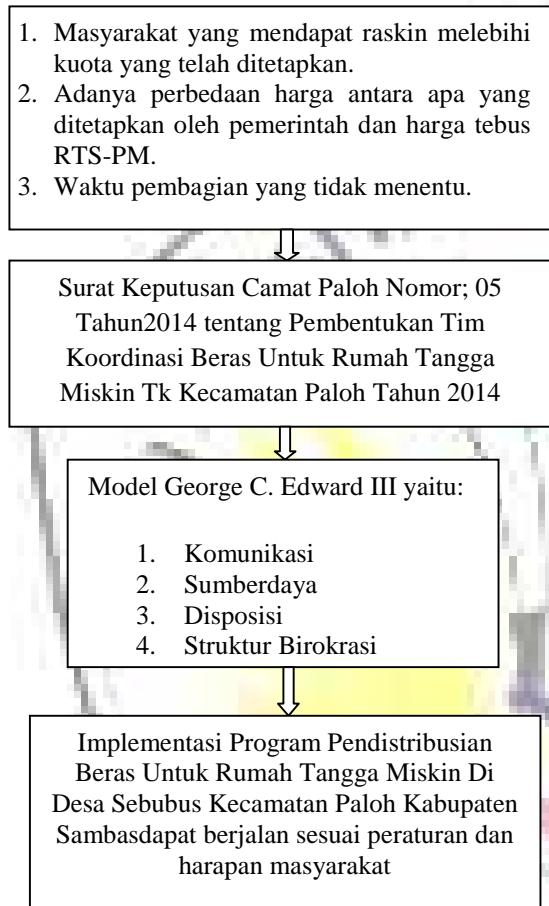
Grindle (dalam Agustino, 2008:93) mengatakan pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu meliahat pada action program dari

individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Berkaitan dengan implementasi kebijakan, Edward III (dalam Agustino , 2008:149) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi. Sabatier (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:19) juga menjelaskan ada enam variabel yang dianggap memberikan kontribusi atau kegagalan implementasi yaitu:

- 1) Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten.
- 2) Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan.
- 3) Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas dilapangan dan kelompok sasaran.
- 4) Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan.
- 5) Dukungan para stakeholder.
- 6) Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Dari beberapa paparan diatas, maka teori yang penulis anggap cocok untuk menggambarkan hasil implementasi program pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin Di Desa sebus

Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas adalah teori Edwar III. Dengan alasan, penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut adalah kerangka piker penelitian dalam penelitian ini:



objek yang telah ditentukan oleh penulis, terutama dalam mendeskripsikan hasil dari implementasi kebijakan beras untuk rumah tangga miskin ini. Tempat penelitian yang penulis pilih adalah Desa Sebus yang terletak Di kecamatan Paloh. Penelitian dilakukan dari bulan Maret 2014 sampai dengan desember 2014. Sedangkan waktu untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Maret 2014 sampai dengan maret 2015. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yang diambil secara *purposive* adalah sebagai berikut: sekretaris camat selaku ketua tim koordinasi raskin, Kepala Desa Sebus, Kepala Dusun Di Desa Sebus, Rukun tetangga (Rt) yang ada Di Desa Sebus, masyarakat penerima raskin, dan masyarakat yang tidak termasuk dalam data RTS-PM. Serta objek dari penelitian ini adalah implementasi Program Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin Di Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Penulis memilih jenis penelitian deskriptif karena dianggap relevan dalam menggambarkan keadaan subjek dan

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang dilakukan

setelah data-data terkumpul. Untuk selanjutnya data tersebut diolah dan pengolahan data banyak menggunakan ungkapan kalimat sebagai interpretasi dari data-data yang diolah tersebut. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi, display dan perivikasi. Adapun untuk menguji validitas data penulis menggunakan triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Sebelum mengimplementasikan Raskin, terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman-pemahaman yang benar mengenai kebijakan Raskin baik instansi terkait maupun petugas yang langsung sebagai pelaksana dilapangan. Hal ini sangat diperlukan agar instansi terkait atau petugas yang akan terjun langsung kelapangan dapat mengerti apa tugas dan tanggung jawabnya.

Komunikasi dalam hal ini diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan yang di implementasikan kepada pelaksana kebijakan (implementor) dan kelompok sasaran (target Group). Yang mana untuk

mengukur keberhasilan variabel komunikasi terdapat tiga faktor yaitu: transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan.

Dalam hal ini, hasil implementasi program pendistribusian beras untuk rumah tangga miskin di Desa Sebusus masih memiliki kendala komunikasi dalam pelaksanaan. Komunikasi yang dimaksudkan disini adalah dalam bentuk sosialisasi mengenai program Raskin kepada masyarakat sebagai sasaran untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara membuktikan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai raskin dikarena kurangnya faktor sosialisasi kepada masyarakat yang menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang Raskin sangat minim dan bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program Raskin. Tak hanya

sosialisasi dari pihak implementor saja yang minim, bahkan kerjasama antar implementor juga belum tercipta kerjasama yang baik.

2. Sumberdaya

Disini sumberdaya yang dimaksud adalah seperti, ketersediaan fasilitas pendukung, informasi dan kewenangan dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksana kebijakan. Ada dua bentuk informasi yang pertama, informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan, dan yang kedua adalah informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan Undang-Undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sebus dalam mengimplementasikan program pendistribusian beras untuk rumah tangga miskin masih memiliki kendala dalam hal sumberdaya. Kendala sumberdaya yang dimaksudkan adalah sumberdaya fasilitas dalam pelaksanaannya belum memadai sehingga mempengaruhi keberhasilan program Raskin di Desa Sebus. Sebagaimana yang diungkapkan Edward III (dalam Widodo, 2008:102) bahwa:

terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakannya menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas (apalagi yang sudah using, terutama teknologi informasi) sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, handal dan dapat dipercaya akan merugikan pelaksanaan akuntabilitas.

Selain fasilitas sarana dan prasaran, fasilitas pendukung lain adalah staff atau sumberdaya manusia termasuk sumberdaya dana. Staff desa yang terlibat dalam mendistribusikan Raskin sudah cukup memadai dengan pendidikan terakhir SMA. Akan tetapi, sumberdaya yang paling memengaruhi ialah ketersediaan dana dalam mendukung sarana dan parasarana.

3. Disposisi Implementor

Disposisi implementor tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam kebijakan yang dilaksanakan. Pada umumnya implementor sudah mengetahui substansi dari kebijakan yang dilaksanakan. Namun ternyata hanya dengan bekal pengetahuan dan pemahaman saja tidak cukup untuk membentuk sikap atau disposisi implementor yang baik. Karakteristik implementor berupa komitmen tidak

ditunjukkan implementor dalam implementasi., hal ini ditunjukkan tidak adanya komitmen dari implementor dalam hal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga muncul ketidakpedulian implementor terhadap masyarakat miskin yang tidak terdata.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan insentif juga tidak kalah pentingnya, insentif diperlukan guna memotivasi implementor supaya bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal inilah yang terjadi pada implementasi program Raskin di Desa Sebusus. Karena insentif yang diberikan kurang, menyebabkan implementor harus menutupi biaya administrasi pendistribusian dengan cara menaikkan harga Raskin dititik bagi. Sehingga terdapat perbedaan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga tebus yang harus dibayar RTS-PM (Rumah Tangga sasaran-Penerima Manfaat).

Selain karena insentif yang kurang, faktor lain yang menyebabkan perbedaan harga tersebut adalah kondisi transportasi dan infrastruktur Desa Sebusus yang belum memadai serta jarak antara satu daerah dengan daerah lainnya yang cukup jauh sehingga diperlukan biaya transportasi.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama berbagai pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan struktur birokrasi juga mencakup dimensi fragmentasi dan dimensi mengenai Standar Prosedur operasi (SOP). Pelaksanaan implementasi kebijakan dengan organisasi pelaksana yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan sehingga diperlukannya koordinasi yang intensif.

SOP sangat mungkin menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan control program yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggungjawab yang baru

dari pada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai cirri-ciri seperti ini.

Sedangkan kegiatan distribusi Raskin Di Desa Sebus, dari segi cakupan tugas, kegiatan yang terkait dengan distribusi Raskin sangatlah kompleks dan melibatkan banyak badan/lembaga atau instansi. Jika pihak yang terlibat tersebut dibawah satu komando, kemungkinan terjadinya hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan pendistribusian dapat berjalan optimal. Tetapi, yang terjadi di Desa Sebus khususnya setiap pihak yang terkait dalam implementasi pendistribusian memiliki garis komandonya masing-masing, yang mana instansi terkait memiliki atasan masing-masing dan memiliki tugas masing-masing.

PENUTUP

1. Simpulan

1) Komunikasi dalam bentuk sosialisasi ternyata masih belum berjalan efektif, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara oleh penulis bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui tentang program Raskin. Sosialisasi yang tidak berjalan efektif disebabkan oleh fasilitas sarana

sosialisasi yang kurang memadai menyebabkan keterlambatan transmisi kebijakan.

- 2) Sumberdaya sarana dan prasarana dalam pendistribusian Raskin kurang menunjang dalam pelaksanaan. Ketersediaan fasilitas yang tidak memadai selain menghambat proses implementasi secara tidak langsung juga akan menimbulkan disposisi implementor yang kurang baik.
- 3) Disposisi implementor cenderung masih kurang responsive terhadap tercapainya tujuan secara maksimal. Hal ini dikarenakan sumberdaya yang kurang menunjang menghambat proses implementasi kebijakan dan mempersulit implementor dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, juga mengenai insentif yang kurang sehingga terjadinya selisih harga tebus yang harus dibayar RTS. Selain insentif juga karena transportasi dan infrastruktur yang tidak menunjang.
- 4) Struktur birokrasi yang panjang dan melibatkan berbagai pihak dalam implementasi pendistribusian Raskin menimbulkan prosedur yang rumit dan kompleks sehingga aktivitas organisasi tidak fleksibel. Prosedur yang panjang dan kompleks ini tentunya memerlukan sumberdaya yang memadai serta waktu yang relative

lama dalam melewati tahap-tahap tersebut yang menimbulkan kurangnya tingkat koordinasi dalam pelaksanaannya dari pihak pembuat kebijakan dan implementor. Selain itu kendala dari implementasi yang dihadapi juga berupa fragmentasi atau penyebaran kewenangan yang tidak jelas bagi implementor pendistribusian Raskin di Desa.

2. Saran

- 1) Sosialisasi program pendistribusian Raskin harus diadakan secara konsisten supaya masyarakat lebih mudah memahami dan mengetahui hak mereka untuk memperoleh Raskin.
- 2) Implementor harus resposif mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam pendistribusian Raskin di Desa Sebusus sehingga masalah-masalah yang terjadi tersebut dapat terselesaikan.
- 3) Kerjasama yang baik antar implementor terutama dalam berkomunikasi sehingga jika terjadi keterlambatan penyaluran Raskin bisa dimaklumi karena ada alasan yang jelas.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hadayaningrat, Soewarno. 1981. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Huseini, Martono. 1987. *Efektifitas Organisasi: Suatu Pendekatan Makna*. Jakarta: Pusat Antar Universitas.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, 2009, *Public Policy*, Jakarta: Gramedia.
- Purwanto, Agus Erwan., Dyah Ratih Sulistyastuti.2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, Nusa. 2011. *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*. Jakarta: Indeks.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Reflika Aditama.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Mengakses Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

Waluyo.2007. *Manajemen Publik dalam Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik di dalam Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: BayuMedia Publishing.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Sumber lain:

Keputusan Bupati Sambas Nomor 4/SETDA-EKON/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Sambas Tahun 2014.

Keputusan Bupati Sambas Nomor 5/SETDA-EKON/2014 Tentang Pagu Raskin Kabupaten Sambas Tahun 2014.

Pedoman Penulisan Skripsi Fisip UNTAN Tahun 2011.

Pedoman Umum Raskin 2014.

Surat Keputusan Camat Paloh Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras Untuk RumahTangga Miskin Tk Kecamatan Paloh Tahun 2014.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Mulyani
 NIM / Periode iulus : E01110075 / IV
 Tanggal Lulus : Selasa, 4 April 2015
 Fakultas/ Jurusan : ISIPOL / ILMU ADMINISTRASI
 E-mail address/ HP : mulyanimursyd@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**):

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK RUMAH
TANGGA MISKIN DI DESA SEBUBUS KECAMATAN DALOH KABUPATEN
SAMBAS

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal Publika.....

Dr. Arifin, M.AB
 NIP. 197105021997021002

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 5 Juni 2015

Mulyani
 NIM. E.01110075

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)